

EFEKTIVITAS PENYELESAIAN ANOMALI DATA
APARATUR SIPIL NEGARA MELALUI LAYANAN SIASN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANGKALAN

Abu Muhammad, Mohammad Natsir

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wijaya Putra

Abstrak

Adminitrasi kepegawaian erat kaitannya dengan pengelolaan atau pengaturan kepegawaian. Pengelolaan kepegawaian yang baik dan benar dapat menghasilkan *output* pegawai dengan kualitas yang mumpuni. Akan tetapi, realita yang terjadi yaitu masih terdapat banyaknya data pegawai yang tidak teliti, akurat, jitu, dan terkini. Hal ini disebabkan oleh penggunaan sistem informasi kepegawaian yang kurang efektif sehingga memunculkan data tidak lengkap, data ganda, dan data hilang, atau disebut anomali data. Hal tersebut kerap ditemukan dalam pelaksanaan pelayanan, salah satunya pelayanan kepegawaian. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas dari *Gibson* dan *Steers* (dalam Sumayadi (2005:107)). Desain penelitian dengan penelitian kualitatif menggunakan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Metode deskriptif dirasa cocok karena bertujuan menggambarkan atau menuliskan fakta secara sistematis dan akurat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dilanjutkan dengan analisis data dilakukan melalui cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian anomali data Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan sudah terlaksana dengan baik walaupun masih terdapat beberapa kendala seperti data dari ASN yang mengalami *trouble* sehingga menyebabkan ketidaksesuaian data antara data yang asli dengan data yang diunggah, kemampuan ASN yang bersangkutan, sistem administrasi pelayanan kepegawaian tidak berjalan efektif dan efisien dikarenakan kendala teknis. Adapun saran yang ingin disampaikan oleh Penulis dalam penulisan Tesis ini yaitu agar melakukan cek rutin data ASN dengan melakukan *updating* data terbaru, konsultasi *by WhatsApp*, dan desk ke OPD terkait.

Kata Kunci: Efektivitas, Anomali Data, Aparatur Sipil Negara

Abstrak

Personnel administration is closely related to the management or arrangement of personnel. Good and correct personnel management can produce employee output with qualified quality. However, the reality is that there is still a lot of employee data that is not thorough, accurate, precise, and up-to-date. This is caused by the use of an ineffective personnel information system that results in incomplete data, duplicate data, and missing data, or what is called data anomalies. This is often found in the implementation of services, one of which is personnel services. This study uses the theory of effectiveness from Gibson and Steers (in Sumaryadi (2005:107)). The research design with qualitative research uses descriptive methods and an inductive approach. The descriptive method is considered suitable because it aims to describe or write facts systematically and accurately. Data collection techniques are carried out by means of interviews, observations, and documentation. Continued with data analysis carried out through data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that the resolution of data anomalies of State Civil Apparatus (ASN) in the Bangkalan Regency Government has been carried out well, although there are still some obstacles such as data from ASN that is experiencing trouble causing data inconsistencies between the original data and the uploaded data, the ability of the ASN concerned, the personnel service administration system is not running effectively and efficiently due to technical constraints. The suggestions that the Author wants to convey in writing this Thesis are to carry out routine checks of ASN data by updating the latest data, consulting by WhatsApp, and desk to the relevant OPD.

Keywords: Effectiveness, Data Anomaly, State Civil Apparatus

Pendahuluan

Administrasi kepegawaian berkaitan dengan *employee problem* dan *employee recruitment* sampai suatu saat nanti pada masa pelepasan atau purna bakti pegawai (Mukhlis, 2012:6). Adminitrasi kepegawaian erat kaitannya dengan pengelolaan atau pengaturan kepegawaian. Pengelolaan kepegawaian yang baik dan benar dapat menghasilkan *output* pegawai dengan kualitas yang mumpuni. Selanjutnya untuk dapat melakukan manajemen kepegawaian dengan baik, dibutuhkan data dan informasi pegawai yang teliti, akurat, jitu, dan terkini, Akan tetapi, realita yang terjadi yaitu masih terdapat banyaknya data pegawai yang tidak teliti, akurat, jitu, dan terkini. Hal ini disebabkan oleh penggunaan sistem informasi kepegawaian yang kurang efektif sehingga memunculkan data tidak lengkap, data ganda, dan data hilang, atau disebut anomali data. Anomali data atau disparitas data, dimana terdapat kesenjangan dan perbedaan antara data yang tercatat dengan data yang nyata (*rill*). Hal tersebut kerap ditemukan dalam pelaksanaan pelayanan, salah satunya pelayanan kepegawaian. Sehingga seringkali menjadi hal yang menghawatirkan dalam kualitas pelayanan kepegawaian yang diterima oleh Aparatur Sipil Negara secara pribadi, namun juga dapat menimbulkan kesalahan dalam penarikan data untuk keperluan kepegawaian.

Pendataan Pegawai Negeri Sipil dahulu pernah diadakan pada tahun 2003 secara manual dan tahun 2015 melalui e-PUPNS. Namun meskipun pemerintah telah menginisiasi kegiatan tersebut, masih banyak Pegawai Negeri Sipil yang tidak ikut serta dalam kegiatan pendataan tersebut. Banyak faktor dan kondisi yang mempengaruhi seperti, kesulitan akses internet, status mutase pegawai, status meninggal yang tidak dilaporkan, status pensiun atau berhenti dini, dan sebagainya yang tidak dilaporkan secara berkala kepada instansi terkait. Sebagai tindak lanjut dari ketidakmaksimalan kegiatan pendataan tersebut, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengeluarkan surat Kepala BKN Nomor K 26-30/V sehingga pada akhirnya dapat mengurangi sisa data yang sebelumnya masih terhenti dan bermasalah. Dengan begitu, hal ini dapat menunjukkan bagaimana penggunaan sistem informasi kepegawaian yang belum dijalankan secara maksimal, sehingga masih banyak ditemukan permasalahan kepegawaian. Selanjutnya untuk mengobati kekhawatiran BKN akan masih banyaknya data bermasalah, BKN akhirnya menciptakan inovasi system informasi dan manajemen kepegawaian berupa pengisian dan pemutakhiran data secara mandiri melalui MySAPK dan dilengkapi dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) dengan tujuan mewujudkan pengelolaan data kepegawaian yang akurat dan terkini (*update*).

Informasi terbaru menyebutkan bahwa pemerintah telah melakukan pergantian MySAPK yang kemudian ditransformasi menjadi MyASN sebagai bentuk *Rebranding* yang secara resmi diperkenalkan pada Oktober 2023 lalu dengan tujuan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepegawaian dengan fitur-fitur layanan yang dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh setiap Aparatur Sipil Negara. Keunggulan lainnya dari MyASN yaitu dapat melakukan monitoring bagaimana tahapan layanan kepegawaian yang telah Aparatur Sipil Negara usulkan secara mandiri. Sedangkan untuk SIASN yang disusun secara sistematis dengan tujuan utamanya meningkatkan transparansi dan efisiensi manajemen administrasi kepegawaian secara terintegrasi, menyeluruh, dan komprehensif. MyASN dan SIASN merupakan layanan tematik dan pendukung kepegawaian yang sudah terintegrasi. Hal tersebut dinilai sebagai wujud transparansi Aparatur Sipil Negara terhadap unsur pengelola kepegawaian yang bersangkutan. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pemuktahiran data mandiri Aparatur Sipil Negara ini wajib dilaksanakan oleh seluruh Aparatur Sipil Negara di Indonesia, yang dalam pelaksanaannya dikoordinir oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) pada masing-masing daerah. Namun dengan semakin canggihnya teknologi informasi yang diciptakan, jika tidak diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusianya, tetap akan terdapat hambatan atau kendala dalam implementasinya. Adapun disparitas data Aparatur Sipil Negara per Juni 2024 di Kabupaten Bangkalan masih terdapat anomali data Aparatur Sipil Negara sebanyak 592 data dengan rincian 512 data belum menyelesaikan SKP Tahun 2023 dan 80 data jenis anomali data lainnya. Sehingga Pemerintah Kabupaten Bangkalan menugaskan instansi kepegawaian yang akan menjadi koordinator dalam melaksanakan pemuktahiran data mandiri Aparatur Sipil Negara melalui aplikasi MyASN dan SIASN yaitu pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kabupaten Bangkalan. Menindaklanjuti Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara dan dengan berbagai macam permasalahan yang ada di lapangan maka Penulis ingin meneliti sejauh mana permasalahan tersebut yang dituangkan dalam sebuah karya tulis dengan judul **“Efektivitas Penyelesaian Anomali Data Aparatur Sipil Negara Melalui Layanan SIASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan”**.

Efektivitas berasal dari bahasa baku efektif atau *effective* dalam bahasa Inggris yang mempunyai makna sesuatu yang berhasil dilakukan dengan tepat sasaran sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Selanjutnya menurut James Gibson (dalam Pasolong, 2010:4), menyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati oleh organisasi maupun instansi tertentu. Perumpamaan jika suatu organisasi semakin dekat dengan sasaran atau tujuan yang ingin dicapai, maka semakin tinggi juga efektivitasnya, begitupun sebaliknya jika pencapaian suatu organisasi yang ada tidak mendekati sasaran yang dimaksud, maka tingkat efektivitasnya rendah. Perwujudan efektivitas terjadi apabila suatu organisasi maupun instansi tertentu menjalankan fungsi dan aktifitas sebagaimana tujuannya, sehingga terwujudnya efektivitas yang *riil* dapat tercapai. Selanjutnya untuk mencapai efektivitas yang dimaksud, harus dimaksimalkan dengan 5 (lima) kriteria efektivitas menurut Gibson dan Steers (dalam Sumaryadi (2005:107), sebagai berikut:

1. Produksi atau Produktivitas

Suatu struktur produktivitas dapat menggambarkan kemampuan sebuah organisasi atau instansi tertentu dalam menghasilkan sejumlah barang dan jasa dengan dibutuhkan proses yang terstruktur dan memadai yang mendukung kelancaran produktivitas.

2. Mutu atau Kualitas

Merupakan kerja mutu atau kualitas dimana menghasilkan suatu produk sesuai harapan pelanggan atau klien sehingga pelanggan dapat menilai dan merasa puas akan produk tersebut. Hal tersebut dapat merealisasikan keberhasilan program secara efektif.

3. Efisien

Dapat diartikan sebagai rasio pengeluaran sebanding dan seimbang dengan rasio pendapatan yang memfokuskan kepada siklus yang teratur yaitu masukan-proses-keluaran, bahkan lebih menekankan pada elemen masukan dan proses.

4. Fleksibilitas

Suatu yang efektif dimulai dengan sebuah perencanaan yang fleksibel dan tidak kaku. Fleksibel dapat diartikan dengan mudahnya beradaptasi dengan lingkungan, adaptif, dan berubah seiring perkembangan.

5. Kepuasan

Sebuah kepuasan mengacu kepada keberhasilan organisasi dalam memenuhi kebutuhan sumber daya manusianya atau karyawannya. Kepuasan dapat diukur dari

kesejahteraan anggotanya, sikap dan kepatuhan anggotanya, serta loyalitas anggota terhadap atasan maupun sesama anggota.

Berdasarkan konsep teori efektivitas diatas, maka Penulis membuat kesimpulan bahwa efektivitas merupakan sebuah konsep dan proses yang tidak serta merta, namun didukung dengan beberapa pendukung seperti, produktivitas, mutu atau kualitas, efisiensi, fleksibilitas, dan kepuasan. Penulis ini mene;iti sejauh mana efektivitas penyelesaian anomali data ASN melalui layanan SIASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan yang didukung oleh teori efektivitas dari *Gibson* dan *Steers* (dalam Sumaryadi (2005:107) dengan 5 (lima) kriteria yaitu, produksi atau produktivitas, mutu atau kualitas, efisiensi, fleksibilitas, dan kepuasan.

Metode Penelitian

Secara umum, penelitian merupakan suatu cara yang peneliti atau penulis lakukan sebagai bentuk perampungan atau penyelesaian permasalahan, dengan menggunakan langkah pengumpulan data-data yang selanjutnya secara sistematis disusun dan kemudian disajikan ke dalam bentuk karya tulis ilmiah (jurnal, skripsi, tesis, dan lain-lain). Dalam melaksanakan penelitian, Penulis diharuskan terlebih dahulu menentukan pendekatan penelitian seperti apa yang akan dipakai. Pada hakikatnya, hal ini dapat menggambarkan sebuah strategi Penulis dalam menyelesaikan penelitiannya sehingga dapat mencapai tujuan yang sebelumnya sudah ditetapkan secara matang. Jenis dan pendekatan penetilian juga dapat dijadikan sebagai pedoman bagi Penulis dalam melakukan penelitian secara terstruktur dan terarah. Menurut Sarwono (dalam Nasruddin, 2019:35), pengertian pendekatan penelitian yaitu sebagai berikut: Pendekatan dalam penelitian diibaratkan sebagai sebuah jembatan yang digunakan Penulis untuk menjembatani berlangsungnya sebuah penelitian secara konseptual dan tepat sasaran sesuai dengan tujuan dalam penelitian. Karena dengan tanpa memakai pendekatan penelitian, maka kemungkinan seorang Penulis akan kebingungan dan kesulitan selama proses penelitian berlangsung. Sesuai pendapat ahli di atas, dapat dimengerti bahwa pendekatan penelitian merupakan sebuah langkah awal bagi Penulis dalam mendapatkan berbagai bentuk data dan informasi yang akan digunakan dalam menyusun, menyelesaikan, dan menyajikan penelitian dengan benar dan terstruktur. Sehingga Penulis dapat mengerti alur dalam menyelesaikan penelitian untuk mencapai tujuan dalam penelitian.

Dalam pendekatan penelitian, terdapat metode penelitian yang kemudian akan Penulis gunakan dalam penelitian ini. Metode penelitian terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu metode

penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif. Denzin dan Lincoln (dalam Creswell 2015:58) menyebutkan bahwa: Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan dalam sebuah penelitian yang terdiri dari beberapa rangkaian penafsiran secara garis besar yang membuat dunia semakin jelas terlihat. Penulis menafsirkan dunia sebagai ikatan yang merepresentasikan melalui teknik-teknik pendukung, mulai dari pengamatan, wawancara, dokumentasi, pencatatan, maupun perekaman. Dari metode kualitatif ini, dapat dilihat bahwa seorang Penulis mempelajari dan mengenali benda-benda yang ada di lingkungan sekitarnya. Selain itu, Penulis juga mampu memaknai fenomena atau permasalahan dalam Masyarakat melalui sudut pandangnya sendiri. Dari penjelasan di atas, Denzin dan Lincoln merepresentasikan bahwa seorang Penulis dengan metode pendekatan kualitatif, secara langsung dapat terjun ke lapangan untuk menemukan dan mengabadikan fenomena-fenomena yang ada melalui wawancara, pencatatan hal penting, mengabadikan bukti dengan dokumentasi. Sehingga dengan metode pendekatan kualitatif ini, Penulis dapat memberikan penafsiran secara langsung terhadap fenomena yang sedang terjadi di lapangan. Sehingga dalam menyelesaikan penelitian ini, Penulis menggunakan jenis metode penelitian kualitatif deskriptif dan didukung dengan pendekatan induktif.

Nazir (2011:52) berpendapat bahwa metode dekriptif yang dimaksud merupakan metode yang digunakan dalam penelitian untuk mengamati objek penelitian untuk mendapatkan suatu rekaan yang berhubungan dengan fakta dan kondisi nyata yang didapat. Selain itu juga untuk melihat bagaimana sifat kejadian yang telah terjadi dan hubungan antar fenomena satu dengan yang lainnya dengan pengamatan dan diteliti secara akurat. Selanjutnya untuk melengkapi metode penelitian kualitatif, Penulis menambah sebuah pendekatan dengan nama pendekatan induktif. Menurut Hasan (2011:174), pendekatan induktif ini digunakan untuk mencari dan menemukan fakta apa saja yang ada dan terjadi di lokasi penelitian yang kemudian dapat secara langsung ditarik kesimpulannya. Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka untuk menuangkan pemikiran Penulis, dalam penelitian ini akan melakukan penelitian yang didukung oleh metode penelitian kualitatif dengan penjabaran deskriptif dan akan lebih mendetail jika dilengkapi dengan pendekatan induktif. Sehingga penelitian ini akan menjelaskan secara teoretis dan konseptual dan kemudian dapat dianalogikan dengan kenyataan atau realita permasalahan yang hangat terjadi di lapangan. Penulis memulai penelitian ini dengan terlebih dahulu menentukan teori utama yang akan Penulis pakai. Teori yang dimaksud yaitu teori efektivitas dari *Gibson* dan *Steers* (dalam Sumaryadi (2005:107)). Seterusnya, Penulis akan melakukan pengujian yang konkret bagaimana keterikatan dan

keterhubungan dengan objek penelitian yaitu Aparatur Sipil Negara terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan, yang kemudian melahirkan konsep efektivitas penyelesaian anomali data ASN yang Penulis pedomani dalam melakukan penelitian.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Efektivitas termasuk ke dalam aspek khusus dimana harus termuat di dalamnya garis besar dari bagaimana Aparatur Sipil Negara Kabupaten Bangkalan dalam melakukan pemutakhiran data secara mandiri dan dapat dipertanggung jawabkan penuh, sehingga permasalahan seperti anomali data dapat diminimalisir. Sesuai dengan ruang lingkup penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, pada bagian ini peneliti akan menjelaskan hasil penelitian sesuai dengan kriteria-kriteria dalam teori efektivitas oleh *Gibson* dan *Steers* (dalam Sumaryadi (2005:107)). Pada bagian penjelasan terkait hasil penelitian dan pembahasan, Penulis menyebutkan lokasi penelitian dilakukan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kabupaten Bangkalan selaku penanggungjawab kepegawaian.

Efektivitas Penyelesaian Anomali Data Aparatur Sipil Negara Melalui Layanan SIASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan

Membahas mengenai efektivitas penyelesaian anomali data Aparatur Sipil Negara melalui layanan SIASN, Pemerintah Kabupaten Bangkalan melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur, memberikan kesempatan kepada para Aparatur Sipil Negara yang memiliki masalah administrasi kepegawaian untuk melakukan pembenahan data kepegawaiannya. Sejalan dengan ini, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kabupaten Bangkalan berdasarkan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Kududukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja untuk membantu Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam mengoptimalkan administrasi dan manajemen kepegawaian seluruh Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Bangkalan. Temuan penelitian ini akan Penulis analisis melalui kriteria teori efektivitas oleh *Gibson* dan *Steers* (dalam Sumaryadi (2005:107) dengan 5 (lima) kriteria yaitu, produksi atau produktivitas, mutu atau kualitas, efisiensi, fleksibilitas, dan kepuasan, dengan penjabaran sebagai berikut:

Produksi atau Produktivitas

Produksi atau produktivitas sering menggambarkan suatu kemampuan instansi atau organisasi dalam menghasilkan sejumlah barang dan jasa sesuai harapan dan untuk memenuhi kebutuhan lingkungan. Produksi mempunyai arti yaitu sebagai penambahan nilai guna suatu barang dan jasa untuk menambah nilai manfaat yang kemudian dapat dimanfaatkan oleh konsumen. Sedangkan untuk produktivitas berkaitan dengan sikap, mental, etos kerja, dan perilaku seseorang yang selalu berusaha untuk melakukan perbaikan kualitas dan mutu dalam meningkatkan efisiensi setinggi mungkin. Dengan arti lain, produksi hanya berfokus pada perubahan input menjadi output, sedangkan produktivitas meliputi perubahan seluruh proses yang dilaksanakan untuk mencari dan menemukan peluang perbaikan dalam rangka menghasilkan keluaran yang berkualitas. Berkaitan dengan efektivitas penyelesaian anomali data Aparatur Sipil Negara melalui layanan SIASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan, dalam hal ini produksi atau produktivitas dapat dilihat dari indikator-indikator yang berkaitan efektivitas penyelesaian anomali data melalui layanan SIASN bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan. Dari segi produktifitasnya dapat dilihat dan diukur melalui indikator yaitu kemampuan ASN dalam mengoperasikan MyASN yang terintegrasi dengan SIASN guna pemutakhiran data secara mandiri dan bagaimana hasil pemutakhiran data mandiri melalui layanan MyASN. Berdasarkan indikator pertama yaitu dari segi produktifitasnya dapat dilihat dan diukur melalui indikator yaitu kemampuan ASN dalam mengoperasikan MyASN yang terintegrasi dengan SIASN guna pemutakhiran data secara mandiri, dapat dilihat dari kemampuan pihak-pihak pengguna layanan MyASN dan SIASN, yaitu kemampuan dari Admin approval sekaligus Admin dari BKPSDA Kabupaten Bangkalan yang menangani layanan tersebut untuk memvalidasi seluruh data ASN serta mengarahkan pemutakhiran data mandiri ASN di Kabupaten Bangkalan.

Sebelumnya, melalui perbincangan Penulis dengan Kepala BKPSDA Kabupaten Bangkalan Ari Murfianto, S.STP., M.Si (45 tahun) sebagai seorang pemimpin yang membawahi OPD dengan kewenangan dan tugas pelayanan kepegawaian untuk mengetahui sejauh mana perkembangan pemutakhiran data ASN di lingkungan Kabupaten Bangkalan Kabupaten Bangkalan sudah lama mengaplikasikan layanan MyASN yang terintegrasi dengan SIASN, di BKPSDA Kabupaten Bangkalan yang bertugas mengkoordinir layanan tersebut. Kami sebagai pelaksana tugas tersebut di daerah, semaksimal mungkin memberikan pelayanan yang terbaik

mulai dari *updating* data terbaru, konsultasi by *WhatsApp*, dan desk kepada seluruh ASN di lingkungan Kabupaten Bangkalan, sehingga apa yang menjadi dapat dikomunikasikan, diketahui dan diatasi bersama. Dengan adanya layanan MyASN yang terintegrasi dengan SIASN, kami berharap dapat memudahkan manajemen administrasi kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan (Kamis, 05 September 2024 pukul 08.45 WIB). Selanjutnya, Penulis dalam rangka mengetahui kemampuan Admin *Aproval* sekaligus Admin dari BKPSDA Kabupaten Bangkalan, maka Penulis melakukan wawancara di BKPSDA dengan Bisma Alfian Imanata, S.Kom (33 tahun) yang mempunyai tugas dan tanggung jawab guna memvalidasi data-data ASN. Sejauh ini, kami selaku Admin *Approval* sekaligus Admin instansi dari BKPSDA Kabupaten Bangkalan sudah cukup baik dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab kami, jadi dengan kemampuan dari Admin *Approval* sekaligus Admin instansi, kami diarahkan dan telah mengikuti bimtek penggunaan layanan MyASN dan SIASN, dan juga telah berkonsultasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat, sehingga kami mampu untuk menggunakan layanan MyASN dan SIASN tersebut (Senin, 02 September 2024 pukul 09.03 WIB).

Selanjutnya memastikan lebih dalam lagi, melalui perbincangan dengan Suprastyoko, SH (46 tahun) selaku Admin *Approval* lain dari BKPSDA Kabupaten Bangkalan untuk menggali lebih dalam lagi kemampuan sebagai Admin *Approval* dalam mengemban tanggungjawab dan tugasnya. Kami sebagai Admin *Approval* siap membantu menyelesaikan kendala-kendala yang sedang dialami oleh ASN di Kabupaten Bangkalan sebisa mungkin, yang penting dari ASN bisa dikomunikasikan dengan kami dan kami dengan tanggungjawab kami siap membantu, membimbing, mengingatkan, dan mengarahkan agar kendala seperti anomali data dapat diminimalisir (Kamis, 12 September 2024 pukul 13.10 WIB). Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa Admin *Approval* sekaligus Admin instansi dari BKPSDA tersebut, maka Penulis menarik kesimpulan bahwa sebagai Admin *Approval* sekaligus Admin instansi tentunya sangat peduli dan selalu berusaha membantu kendala dari ASN se Kabupaten Bangkalan sehingga diharapkan peremajaan data ASN terlaksana dengan baik, efektif dan efisien.

Selanjutnya melalui indikator yang kedua yaitu kemampuan ASN dalam mengoperasikan MyASN yang terintegrasi dengan SIASN guna pemutakhiran data secara mandiri dan bagaimana hasil pemutakhiran data mandiri melalui layanan MyASN, dari Siti Hikmatun (50 tahun) kita dapat mengetahui bagaimana ASN tersebut melakukan pemutakhiran

data secara mandiri melalui MyASN. Untuk peremajaan data kami sebagai ASN dapat melakukan input data secara mandiri, kami bisa melakukannya sendiri, sehingga data kami bisa aktual dan terbaru. Dengan dukungan pemerintah menciptakan layanan MyASN memudahkan kami melakukan input data secara mandiri sehingga jika terdapat perubahan dan pembaharuan data dari kami selaku ASN dapat kami perbarui sendiri melalui MyASN. Apabila kami mengalami kesulitan, kami sering berkomunikasi dengan Admin verifikasi yang ada di BKPSDA Kabupaten Bangkalan (Kamis, 12 September 2024 pukul 09.35 WIB). Berdasarkan wawancara tersebut, Penulis dapat menyimpulkan bahwa ASN di Kabupaten Bangkalan rata-rata mampu dalam mengoperasikan layanan MyASN dengan mandiri. Terdapat juga sebagian kecil yang kurang mampu menggunakan layanan MyASN dengan kendala karena sudah memasuki usia lanjut, bisa juga karena ketidakfokusan dalam menginput data. Jika terdapat kendala ataupun kesalahan input mereka akan berkonsultasi dengan Admin Approval yang ada di BKPSDA, agar Admin Approval dapat membantu mengatasi kendala dari ASN tersebut. Anomali data secara signifikan dapat mempengaruhi perubahan informasi sampai pada titik yang dinilai penting dalam banyak bidang, sehingga proses deteksi anomali dibutuhkan dalam hal ini. Pemerintah Kabupaten Bangkalan melalui BKPSDA, memberikan kesempatan kepada para ASN yang memiliki masalah administrasi kepegawaian untuk melakukan pembenahan data kepegawaiannya.

Permasalahan data atau anomali data ini memang kerap sekali terjadi, oleh karena itu berdasarkan hasil observasi Penulis, fasilitasi yang dilakukan oleh BKPSDA sangat bermanfaat bagi para ASN yang mengalami permasalahan administrasi kepegawaiannya, apalagi pada akhir dan awal tahun, pasti pasien anomali data membludak. Para informan penelitian ini mengatakan, terkadang Admin fasilitator yang bertugas melayani sampai diluar batas jam kerja atau sore hari setelah jam kerja berakhir. Dengan begitu, Penulis menyimpulkan bahwa fasilitasi pelayanan penyelesaian anomali data ASN oleh BKPSDA sudah dilakukan dengan maksimal dan juga prima. Layanan SIASN terlahir sebagai wujud implementasi Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pada khususnya dalam pengintegrasian data ASN, maka diciptakanlah Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) yang mengglobal secara nasional dengan berbagai sub layanan di dalamnya.

Berdasarkan hasil penelitian, ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan sebagian sudah memahami dan menguasai terhadap layanan SIASN, namun sebagian juga belum

menguasai penuh bagaimana cara kerja layanan SIASN. Banyaknya anomali data terjadi juga disebabkan karena ASN tersebut kurang *update* penguasaannya terhadap alur dalam layanan SIASN. Juga disebabkan karena rasa enggan untuk belajar dan ingin tahu, akhirnya data yang seharusnya diisi, menjadi tidak diisi dan terabaikan, data yang seharusnya disinkronkan menjadi tidak sinkron, dan data yang seharusnya *update* menjadi tidak *update*, hal ini menjadi salah satu penyebab terjadinya anomali data.

Penutup

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis berkaitan dengan efektivitas penyelesaian anomali data ASN melalui layanan SIASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan, maka Penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: Efektivitas penyelesaian anomali data ASN melalui layanan SIASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan sudah efektif. Hal ini dapat dilihat dari dimensi-dimensi efektivitas dibawah ini:

- a. Produksi atau produktivitas yang berkaitan dengan efektivitas penyelesaian anomali data Aparatur Sipil Negara melalui layanan SIASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan, dalam hal ini dapat dilihat dari indikator-indikator yang berkaitan. Dari segi produktifitasnya dapat dilihat dan diukur melalui indikator yaitu kemampuan ASN dalam mengoperasikan MyASN yang terintegrasi dengan SIASN guna pemutakhiran data secara mandiri dan bagaimana hasil pemutakhiran data mandiri melalui layanan MyASN.
- b. Mutu atau kualitas dalam hal ini keterkaitan dengan efektivitas penyelesaian anomali data Aparatur Sipil Negara melalui layanan SIASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan, dapat dilihat dari indikator-indikator yang berkaitan dengan mutu atau kualitas dimaksud. Indikator yang dimaksud yaitu berkaitan dengan kualitas layanan MyASN dan SIASN dan manfaat penggunaan layanan MyASN dan SIASN oleh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
- c. Efisiensi kaitannya dengan efektivitas penyelesaian anomali data Aparatur Sipil Negara melalui layanan SIASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan, dapat dilihat dari indikator-indikator yang berhubungan yaitu bagaimana proses penyelesaian anomali data ASN melalui layanan SIASN dan perbandingan keluaran sumber daya yang digunakan dengan hasil yang dicapai dalam penyelesaian anomali data ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

- d. Fleksibilitas bisa diartikan sebagai suatu perencanaan yang sifatnya tidak kaku dan bisa beradaptasi dengan perubahan (adaptif). Hubungan antara fleksibilitas dengan efektivitas penyelesaian anomali data Aparatur Sipil Negara melalui layanan SIASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan, dapat dilihat dari indikatornya yaitu kesiapan BKPSDA Kabupaten Bangkalan dalam perencanaan penyelesaian anomali data ASN melalui layanan SIASN dan pelaksanaan penyelesaian anomali data ASN melalui layanan SIASN.
- e. Kepuasan berkaitan dengan efektivitas penyelesaian anomali data Aparatur Sipil Negara melalui layanan SIASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan, dalam kriteria kepuasan dapat dilihat dari indikator-indikator yang berkaitan yaitu indikator kepuasan penggunaan layanan MyASN dan SIASN di Kabupaten Bangkalan dan indikator kesesuaian data ASN di Kabupaten Bangkalan.

Efektivitas penyelesaian anomali data ASN melalui layanan SIASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan masih mengalami beberapa kendala yang menjadi penghambat, yaitu sebagai berikut:

- a. Terdapat beberapa data dari ASN yang mengalami *trouble* sehingga menyebabkan ketidaksesuaian data antara data yang asli dengan data yang diunggah, bahkan mengakibatkan kesalahan data atau anomali data. Hal ini yang memicu ditemukannya banyak data fiktif pegawai berupa data ganda, data hilang, dan data tidak lengkap.
- b. Terdapat kendala dari sumber daya manusia atau Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan berasal dari beberapa kalangan sebagian sudah termasuk dalam generasi tua, terdapat sebagian yang tidak mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga tidak bisa mengoperasikan aplikasi MyASN dalam rangka pemultahiran data mandiri ASN tersebut.
- c. Penggunaan sistem administrasi pelayanan kepegawaian tidak berjalan efektif dan efisien dikarenakan kendala teknis. Kendala ini biasa terjadi seiring berjalannya waktu dan biasa juga terjadi pada layanan atau aplikasi yang memfasilitasi banyak pengguna, salah satunya pada layanan MyASN dan SIASN ini dalam hal ini kerap sekali terjadi *maintenance*.

Dari beberapa kendala yang muncul, BKPSDA Kabupaten Bangkalan telah melakukan upaya dengan Langkah sebagai seperti di bawah ini:

- a. BKPSDA Kabupaten Bangkalan melakukan *updating* data terbaru kepada ASN di Kabupaten bangkalan Dalam rangka meningkatkan efektivitas pemutakhiran data mandiri ASN dan menghindari adanya anomali data di kemudian hari.
- b. Untuk mempermudah pelayanan kepada para pengguna layanan MyASN, maka BKPSDA Kabupaten Bangkalan juga menyediakan layanan berkonsultasi *by WhatsApp*.
- c. BKPSDA Kabupaten Bangkalan juga melaksanakan desk terkait layanan MyASN dan SIASN dengan turun langsung ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bangkalan.

Referensi

Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Creswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Ferdinand, A. (2013). *Metode Penelitian Manajemen*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hasan, E. (2011). *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Galia Indonesia.

Huberman, M. & M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.

Khadarisman, M. (2018). *Managemen Aparatur Sipil Negara*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.

Nasruddin, J. (2019). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Panca Terra Firma.

Nazir, M. (2011). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Pasolong, H. (2010). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Simangunsong, F. (2016). *Metodologi penelitian pemerintahan Teoritik Legalistik Empirik Inovatif*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.